

A decorative graphic consisting of three blue circles of varying sizes and two thin blue lines. One line starts from the top left and connects to the top of the largest circle. Another line starts from the top left and connects to the top of the medium-sized circle. A third line starts from the top right and connects to the top of the largest circle. The circles have a slight gradient and are semi-transparent.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SEKRETARIS
2	TUGAS	:	Mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, umum, kpegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan
3	FUNGSI	:	<p>a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;</p> <p>b. menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;</p> <p>c. Melaksanakan pelayanan administrasi Kesekretariatan dinas yang meliputi bagian umum,kepegawaian,program,keuangan dan perlengkapan;</p> <p>d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;</p> <p>e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;</p> <p>f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil pada bidang tugasnya;</p> <p>g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.</p>

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Aparatur, Peralatan barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah yang di sediakan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Aparatur, Peralatan barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen LHE-SAKIP

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN



SUKRI,SE

NIP. 19800401 200012 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	TUGAS	:	Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada bidang Pemenuhan Anak (PHA)
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Merumuskan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>b. Merencanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>c. Menyusun penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>d. Menyusun penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>g. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>h. Melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>i. Mempersiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>j. Mempersiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>l. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p>

		n. Mempersiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
		o. Membuat penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi
		p. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
		q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
3	FUNGSI	:	<p>a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.</p> <p>b. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.</p> <p>c. Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.</p> <p>f. Penyelenggaraan penyusunan data gender disemua bidang pembangunan</p> <p>g. Penyelenggaraan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.</p> <p>h. Melaksanakan penyiapan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.</p> <p>i. Penyelenggaraan penatalaksanaan administrasi, dokumen tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.</p> <p>j. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak anak.</p> <p>k. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi partisipasi pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.</p> <p>l. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>m. Melaksanakan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak, partisipasi anak, dan perlindungan anak.</p> <p>n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan hak anak.</p> <p>o. Menyelenggarakan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dilaksanakan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		$\frac{\text{Jumlah PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan}}{\text{Jumlah PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dilaksanakan}} \times 100\%$	
Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan Komprehensif	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan Komprehensif}} \times 100\%$	
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Jumlah Anak korban Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		$\frac{\text{Jumlah anak Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Anak korban Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif}} \times 100\%$	

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos
NIP. 19821212 201001 2 043

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	TUGAS	:	Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana c. Pelaksanaan norma,standar prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk dikabupaten/kota f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) h. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan,advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana j. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten /kota k. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota l. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten/Kota m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana n. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya p. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga q. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga r. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita s. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R) t. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia u. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga v. Pemantantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga w. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga x. Pelaksanaan koodinasi dalam pelaksanaan tugasnya

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Penguatan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	$\frac{\text{Jumlah keluarga sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR, BKL}}{\text{Jumlah Seluruh Keluarga Sasaran}} \times 100$	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



NURHAYANTO, S.Pd.SD
NIP. 19680512 199303 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

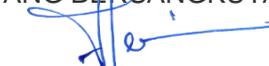
1	JABATAN	:	KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
2	TUGAS	:	Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan</p> <p>b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan</p> <p>c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan</p> <p>d. Meninventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah</p> <p>e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya</p> <p>f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup satuan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas</p> <p>g. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan dinas</p> <p>h. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan</p> <p>i. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas</p> <p>j. Melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat</p> <p>k. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang</p> <p>l. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang</p> <p>m. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang</p> <p>n. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan aset</p> <p>o. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Karta Inventaris Ruangan (KIR)</p> <p>p. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya</p> <p>q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan perlengkapan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan</p> <p>r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.</p>

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan Yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan-Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Selatpanjang, 9 Januari 2024

YANG BERSANGKUTAN



M. NIZAR, S.Sos

NIP. 19831217 201001 1 016

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM
2	TUGAS	:	Menyiapkan bahan-bahan bimbingan,kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	URAIAN TUGAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah e. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran g. Melakukan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan program h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, mmbuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dinas i. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai seasuai petunjuk atasan j. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya l. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) m. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran n. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA o. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA p. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan r. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai bahan pertanggungjawaban s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pengelola Gaji
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA, RENJA dan RENJA Perubahan
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen SAKIP, LKPj, IKK-LPPD

Selatpanjang, 9 Januari 2024

YANG BERKAWAL

MUHAMMAD RISKY ARIFANDI, SH

NIP. 19820521 201407 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	KAUPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	TUGAS	:	Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPPA
			b. Penyusunan program kerja UPTD PPPA
			c. Menyusun Rekomendasi hasil Pengelolaan kasus
			d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA
			e. Membina dan Meningkatkan Kemampuan para Pegawai dalam lingkungan UPTD PPA
			f. Melaksanakan administrasi UPTD PPA

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	UPTD PPA
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	UPTD PPA
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	UPTD PPA
Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	UPTD PPA

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

NIP.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	: SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2	TUGAS	: Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan dan jaminan sosial
3	URAIAN TUGAS	: a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial
		b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi
		c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial
		d. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi
		e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial
		f. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga
		g. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga
		h. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi
		i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	: SUBKOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL
2	TUGAS	: Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial
3	URAIAN TUGAS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum d. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus e. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia f. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik g. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual h. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas i. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga j. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga k. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga l. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi m. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi n. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar dan Gepeng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
2	TUGAS	:	Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
3	URAIAN TUGAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas d. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial f. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya g. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil h. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan i. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial j. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial k. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten l. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga m. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial n. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Bidang Sosial
Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Bidang Sosial

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



ROMA SUCIANA,SE
NIP. 19840601 201102 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	TUGAS	:	Meyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG)
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Mempersiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>b. Mempersiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>c. Mempersiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>d. Mempersiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>e. Mempersiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>f. Mempersiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>g. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>h. Membuat penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>i. Mempersiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>j. Mempersiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>k. Mempersiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>l. Mempersiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>m. Mempersiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga, ekonomi, sosial, politik dan hukum</p> <p>n. Mempersiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi</p>

	o. Mempersiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi
	p. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum
	q. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
	r. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga
	s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	TUGAS	:	Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada bidang Pemenuhan Anak (PHA)
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Merumuskan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>b. Merencanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>c. Menyusun penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>d. Menyusun penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>g. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>h. Melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>i. Mempersiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>j. Mempersiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>l. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p>

		n. Mempersiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
		o. Membuat penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi
		p. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
		q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Mempersiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang</p> <p>c. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>d. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang</p> <p>e. Melaksanakan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang</p> <p>f. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang</p> <p>g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang</p> <p>i. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang</p> <p>j. mengumpulkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>k. Menginventarisasi bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>l. Menginventarisasi bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p>

	<p>m. Mengkoordinir penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>n. Mengkoordinir penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>o. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan khusus anak</p> <p>p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang</p> <p>q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>r. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>s. Mempersiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>t. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>u. Mempersiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>v. Mempersiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>w. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan</p>
--	--

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



JUNAIDAH, A.Md, AFM
NIP. 19820129 200604 2 014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
2	TUGAS	:	Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,norma,standar,prosedur,dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Merumuskan kebijakan teknis daerah Kabupaten/Kota sub bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota sub bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>c. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>d. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk</p> <p>e. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>f. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>g. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana</p> <p>h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sub bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>i. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi sub bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>j. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan</p> <p>k. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh keluarga berencana/Petugas Lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana</p> <p>l. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga</p> <p>m. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi</p> <p>n. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya</p> <p>o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan</p>

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

NIP.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR KELUARGA BERENCANA
2	TUGAS	:	Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi keluarga berencana
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Merumuskan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota sub bidang keluarga berencana</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota sub bidang keluarga berencana</p> <p>c. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria sub bidang keluarga berencana</p> <p>d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>e. Melaksanakan pelayanan KB Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sub bidang keluarga berencana</p> <p>h. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi sub bidang keluarga berencana</p> <p>i. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>j. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>k. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB</p> <p>l. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi</p> <p>m. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya</p> <p>n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan</p>

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	SUBKOORDINATOR KETAHANAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (KS)
2	TUGAS	:	Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,norma,standar,prosedur,dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan pembinaan kesejahteraan keluarga
3	URAIAN TUGAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Melaksanakan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang bina keluarga balita d. Melaksanakan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pembinaan ketahanan remaja e. Melaksanakan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang bina keluarga lansia dan rentan f. Melaksanakan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga g. Memantau dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga h. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga i. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera j. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia k. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja l. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi m. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	ANALIS TATA USAHA
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang tata usaha
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Tata Usaha sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
			b. Mengklasifikasian bahan dokumen bidang Tata Usaha sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
			c. Menelaah bahan dokumen bidang Tata Usaha berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
			d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Tata Usaha untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat.
			e. Menyusun rekomendasi bidang Tata Usaha berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya data Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang di susun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang di susun	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

NIP.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan SDM Aparatur
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Pengembangan SDM Aparatur sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
			b. Mengklasifikasian bahan dokumen bidang Pengembangan SDM Aparatur sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
			c. Menelaah bahan dokumen bidang Pengembangan SDM Aparatur berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
			d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Pengembangan SDM Aparatur untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat;
			e. Menyusun rekomendasi bidang Pengembangan SDM Aparatur berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan OPD	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan OPD yang disusun	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan OPD yang disusun	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terkelolanya sistem informasi aparatur sipil negara di OPD	Jumlah sistem informasi aparatur sipil negara di OPD yang di kelola	Jumlah sistem informasi aparatur sipil negara di OPD yang di kelola	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang di sediakan	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang di sediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

NIP.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENGADMINISTRASIAN UMUM
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang Umum
3	URAIAN TUGAS	:	a. Menerima dokumen bidang Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
			b. Mencatat berkas masuk bidang Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
			c. Mendokumentasikan berkas Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di susun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di susun	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pengadministrasian Surat keluar/masuk Dinas yang sesuai dengan Prosedur	Jumlah Surat keluar/masuk Dinas yang sesuai Prosedur	Jumlah Surat keluar/masuk Dinas yang sesuai Prosedur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tersusunnya Dokumen surat keluar/masuk dinas yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen surat keluar/masuk dinas yang tersusun	Jumlah Dokumen surat keluar/masuk yang tersusun	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



WATI USMANITA
NIP. 19660721 198603 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENATA LAPORAN KEUANGAN
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan dan penelaahan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan di bidang Penata Laporan keuangan
3	URAIAN TUGAS	:	a. Menerima bahan dan data bidang Laporan Keuangan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
		:	b. Melakukan kegiatan penelaahan karakteristik dan spesifikasi bahan dan data bidang Laporan Keuangan sesuai prosedur agar tercapai hasil yang maksimal;
		:	c. Melakukan pemeliharaan bahan dan data bidang Laporan Keuangan sesuai prosedur agar hasil pemeliharaan dapat bermanfaat.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tahunan SKPD yang di selesaikan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tahunan SKPD	LRA, Neraca, LO, LPE, CALK
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD yang di selesaikan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	LRA, Neraca, LO, LPE
Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulanan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan SKPD yang di selesaikan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan SKPD	LRA, Neraca, LO, LPE
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan SKPD yang di selesaikan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan SKPD	LRA

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



AGUS SISWANTO, SE
NIP. 19880808 202012 1 014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan Penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja dibidang Program Anggaran dan Pelaporan.
3	URAIAN TUGAS	:	a. Menerima Dokumen bidang Program Anggaran dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
			b. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Program Anggaran dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
			c. Mengklasifikasikan bahan dokumen dibidang Program Anggaran dan Pelaporan sesuai obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
			d. Membuat telaah bidang Program Anggggaran dan Pelaporan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen RENSTRA, RENJA dan RENJA Perubahan
Terlaksananya Penginputan Dokumen RKA-SKPD Kedalam SIPD Kemendagri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang terinput	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang terinput	Dokumen RKA-SKPD
Terlaksananya Penginputan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kedalam SIPD Kemendagri	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terinput	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terinput	Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di susun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen SAKIP, Evaluasi Renja

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



NURDIN SRIJAYA, SE, M.Si
NIP. 19800507 201001 1 027

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	VERIFIKATOR KEUANGAN
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran
3	URAIAN TUGAS	:	a. Melakukan verifikasi bahan usulan pencairan anggaran terhadap bukti bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya.
SASARAN / KINERJA UTAMA			
SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pengajuan surat pertanggungjawaban (SPJ) UP, GU, TU, LS
Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang di susun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang di susun	Dokumen Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan
Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang di susun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang di susun	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN


EKA FARADILA SHINTA, A.Md
 NIP. 19891008 201407 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENGELOLA GAJI
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang Gaji
3	URAIAN TUGAS	:	a. Menyiapkan bahan bahan di bidang Gaji dan Kegiatan dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik ;
			b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal ;
			c. Menyusun laporan bidang Gaji secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Daftar gaji Pegawai	Jumlah Daftar Gaji pegawai yang disusun	Jumlah Daftar Gaji pegawai yang disusun	Daftar Gaji ASN dan Non ASN
Tersusunnya Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disusun	Jumlah Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disusun	Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Tersedianya Amprah Gaji Bulanan Pegawai	Jumlah Dokumen Amprah Gaji Bulanan Pegawai yang Tersedia	Jumlah Dokumen Amprah Gaji Bulanan Pegawai yang Tersedia	Amprah Gaji Pegawai
Tersusunnya Arsip Daftar Gaji dan TPP PNS	Jumlah Dokumen Arsip Daftar Gaji dan TPP yang Tersusun	Jumlah Dokumen Arsip Daftar Gaji dan TPP yang Tersusun	Arsip Daftar Gaji dan TPP PNS
Tersedianya Formulir 1721-A2 bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai	Jumlah Formulir 1721-A2 bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai yang di sediakan	Jumlah Formulir 1721-A2 bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai yang di sediakan	Formulir 1721-A2

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



LUKMANURHAKIM, AMd
NIP. 19750506 201001 1 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan ;
			b. Mengklasifikasian bahan dokumen bidang Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas ;
			c. Mengevaluasi kegiatan bidang Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk disampaikan kepada pimpinan ;
			d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai hasil evaluasi dan pertanggungjawaban.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Bidang Sosial
Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Bidang Sosial

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

NIP.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	ANALIS PELAYANAN SOSIAL
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Pelayanan Sosial
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Pelayanan Sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan ;
			b. Mengklasifikasian bahan dokumen bidang Pelayanan Sosial sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
			c. Mengevaluasi kegiatan bidang Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk disampaikan kepada pimpinan ;
			d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Pelayanan Sosial untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat ;
			e. Menyusun rekomendasi bidang Pelayanan Sosial berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang memerlukan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang memerlukan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	Jumlah Data Orang yang memerlukan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	Bidang Sosial
Tersedianya Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang memerlukan bantuan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang memerlukan bantuan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	Jumlah Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang memerlukan bantuan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	Bidang Sosial
Tersedianya Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang membutuhkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang membutuhkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota di sediakan	Jumlah Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar serta Gepeng yang membutuhkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota di sediakan	Bidang Sosial
Tersusunnya Laporan Orang yang telah Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Orang yang telah Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Jumlah Laporan Orang yang telah Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Bidang Sosial

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Orang yang telah Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Orang yang telah Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Jumlah Laporan Orang yang telah Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Bidang Sosial

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN



BASRI. A, S.Sos

NIP. 19680711 200801 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENYUSUN BAHAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja di bidang bahan pemberian bantuan teknis
3	URAIAN TUGAS	:	a. Menerima dokumen bidang Bahan Pemberian Bantuan Teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian ;
			b. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Bahan Pemberian Bantuan Teknis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan ;
			c. Pengklasifikasian bahan dokumen bidang Bahan Pemberian Bantuan Teknis sesuai dengan objek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas ;
			d. Membuat telaah Bahan Pemberian Bantuan Teknis berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Tersusunnya Laporan Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	ANALIS DAMPAK SOSIAL
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Dampak Sosial
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Dampak Sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan ;
			b. Mengklasifikasian bahan dokumen bidang Dampak Sosial sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas ;
			c. Menelaah bahan dokumen bidang Dampak Sosial berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ;
			d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Dampak Sosial untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat.
			e. Menyusun rekomendasi bidang Dampak Sosial berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya laporan Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Tersusunnya Laporan Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sosial
Tersusunnya Laporan analisis Data Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Laporan analisis Data Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Laporan analisis Data Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Bidang Sosial

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



M. YUSUF, SH
NIP. 19710820 200801 1 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PEMERIKSA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan pemeriksaan pelayanan keluarga berencana dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mencatat dan menghitung Pelayanan Keluarga Berencana yang diserahkan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar Pelayanan Keluarga Berencana yang diperiksa dapat diketahui jumlahnya;
			b. Menginventarisir permasalahan Pelayanan Keluarga Berencana yang diberikan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar Pelayanan Keluarga Berencana dapat diketahui permasalahannya;
			c. Mengelompokan Pelayanan Keluarga Berencana menurut jenis dan sifat permasalahannya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pemeriksaan;
			d. Melakukan pemeriksaan Pelayanan Keluarga Berencana, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar mendapatkan temuan sesuai dengan yang diharapkan;

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan hasil Pemeriksaan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Pengendalian Program KKBPK yang di susun	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Pengendalian Program KKBPK yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan hasil Pemeriksaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang di susun	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan hasil pemeriksaan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan hasil pemeriksaan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang di susun	Jumlah Laporan hasil pemeriksaan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan hasil pemeriksaan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan hasil pemeriksaan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang di susun	Jumlah Laporan hasil pemeriksaan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan hasil pemeriksaan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan hasil pemeriksaan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan hasil pemeriksaan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan pengelolaan advokasi konseling dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3	URAIAN TUGAS	:	<p>a. Menyiapkan bahan-bahan di bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik ;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal ;</p> <p>c. Menyusun laporan Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.</p>

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang di susun	Jumlah Laporan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang di susun	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas yang di susun	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN



RIATI, AMK

NIP. 19810715 200501 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	PENGAWAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan pengawasan pelayanan keluarga berencana
3	URAIAN TUGAS	:	a. Menerima dan menginventarisasi data pelayanan keluarga berencana sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut ;
		:	b. Menelaah data pelayanan keluarga berencana sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan ;
		:	c. Mengawasi pelayanan keluarga berencana sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan;

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan hasil Pengawasan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pengendalian Program KKBPK yang di susun	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pengendalian Program KKBPK yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan hasil Pengawasan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang di susun	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan hasil Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang di susun	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan hasil Pengawasan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang di susun	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan hasil Pengawasan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan hasil Pengawasan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan hasil Pengawasan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024
YANG BERSANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan kesejahteraan keluarga dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan ;
			b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas ;
			c. Menelaah bahan dokumen bidang Kesejahteraan Keluarga berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ;
			d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Kesejahteraan Keluarga untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat ;
			e. Menyusun rekomendasi bidang Kesejahteraan Keluarga berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang di susun	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang di susun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tersusunnya Laporan Penyediaan biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Penyediaan biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang di susun	Jumlah Laporan Penyediaan biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang di susun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang di susun	Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Selatpanjang, 9 Januari 2024

YANG BERSANGKUTAN



RETNI AGNESTY, S.Psi

NIP. 19930824 202012 2 029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1	JABATAN	:	ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	TUGAS	:	Melakukan kegiatan analisis dan pènelaahan pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
3	URAIAN TUGAS	:	a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Pemberayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan ;
		:	b. Mengklasifikasian bahan dokumen bidang Pemberayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
		:	c. Menelaah bahan dokumen bidang Pemberayaan Perempuan dan Anak berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ;
		:	d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Pemberayaan Perempuan dan Anak untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat ;
		:	e. Menyusun rekomendasi bidang Pemberayaan Perempuan dan Anak berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya Laporan hasil Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang di susun	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tersusunnya Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tersusunnya laporan Pelaksanaan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah laporan Pelaksanaan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
---	---	---	---

Selatpanjang, 9 Januari 2024
 YANG BERSANGKUTAN



MARTIA NINGSIH, S.Psi
 NIP. 19960307 202012 2 018